

2026, INDONESIA AKAN UTANG RP781,9 TRILIUN

Presiden Prabowo Subianto merencanakan penambahan utang negara sebesar Rp781,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Jumlah ini menjadi yang terbesar dalam lima tahun terakhir. Adapun utang Indonesia dari tahun ke tahun antara lain: Rp870,5 triliun pada 2021; Rp696 triliun pada 2022; Rp404 triliun pada 2023; Rp558,1 triliun pada 2024; serta Rp715,5 triliun pada 2025 (outlook). Dengan penambahan ini, total utang Indonesia akan semakin meningkat. Di sisi lain, pada 2026 pemerintah menyiapkan anggaran Rp599,44 triliun untuk membayar bunga utang, naik 8,6% dibanding outlook 2025. Dari jumlah itu, pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai Rp538,70 triliun, sedangkan bunga utang luar negeri sebesar Rp60,74 triliun. Lalu, untuk apa rencana penambahan utang ini? Pemerintah menyebut utang tersebut digunakan untuk menunjang agenda pembangunan serta meredam gejolak ekonomi. Hal ini tertuang dalam dokumen Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, dikutip dari detikfinance, Selasa (19/8/2025). APBN dipastikan tetap dapat menjalankan program-program pembangunan prioritas di tengah risiko ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Pemerintah juga memastikan strategi pengelolaan utang tahun 2026 dirancang agar mendukung agenda tersebut. Kebijakan anggaran yang ekspansif ini disebut sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal, sehingga APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai tujuan pembangunan.

[BACA HAL 11...](#)

RP 781.9
TRILIUN

RAMAI ROYALTI, MENKUM AKAN AUDIT LMK DAN LMKN

Merespons tuntutan transparansi dalam pembayaran royalti music, Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas akan melakukan audit terhadap Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Audit ini penting untuk memastikan hak-hak para musisi dan pencipta lagu terpenuhi secara adil. Rencana ini, kata dia, akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak LMK dan LMKN untuk memastikan pelaksanaan audit dapat berjalan lancar.

"Khusus royalti, ini lagi mau kami kumpulkan LMKN dan LMK-nya. Kami akan minta supaya akan ada audit, baik LMK-nya maupun LMKN-nya," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/8/2025) malam.

Dia mengatakan pelaksanaan audit bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menentukan sistem pemungutan royalti yang paling tepat. Pasalnya, kata dia, tuntutan publik terhadap royalti musik tidak salah karena terkait dengan transparansi penggunaan sistem, khususnya mengenai besaran royalti yang dipungut serta mekanisme penyalurannya.

"Nah, karena itu, hanya mekanisme audit yang bisa memberi kita gambaran seperti itu," kata dia.

Dengan demikian, Supratman menuturkan pihaknya akan mengumpulkan semua pihak untuk mendapatkan masukan terkait penarikan royalti. Dia pun meminta LMKN nantinya bisa mengundang semua pelaku usaha untuk membahas hal tersebut.

"Tapi yang saya mau tegaskan bahwa satu, tidak boleh membebani UMKM terutama. Itu yang paling penting," kata Supratman.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola royalti musik yang saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Chusnunia menjelaskan perbaikan tata kelola menjadi penting, terutama saat ini para pelaku usaha sedang cemas dengan risiko hukum bila memutar musik di tempat usahanya.

Chusnunia memahami bahwa terdapat aturan terkait pemutaran musik di ruang publik seperti kafe

yang mengharuskan membayar royalti kepada pemegang hak cipta. Aturan tersebut seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel menyampaikan apresiasi atas terbitnya beleid Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Aturan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu di layanan publik bersifat komersial, yang dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

"Musik sebagai hasil kebudayaan masyarakat harus tetap bisa diakses publik, sekaligus menjamin hak-hak ekonomi pencipta dan pelaku terkait. Peraturan Menteri Hukum ini menjadi

fondasi hukum yang memperkuat ekosistem pertunjukan dan musisi nasional," ujar pria yang kerap disapa Once Mekel dikutip Parlemenaria Senin (18/8/2025).

Ia menekankan pentingnya optimalisasi peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai pendistribusi royalti yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta penataan hubungan fungsional antara LMK dan LMKN sebagai pengelola royalti musik secara kolektif. Ia juga



Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

mendorong pembangunan dan pengembangan sistem digital untuk memonitor penggunaan hak cipta lagu secara akurat, real-time, dan terpercaya, termasuk pihak penyedia sistem yang objektif dan transparan.

Selain itu, Once mengingatkan pentingnya pemutakhiran data di Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) sebagai basis informasi lengkap mengenai pencipta, pelaku pertunjukan, dan pemegang hak rekaman. Ia juga menjelaskan kemungkinan revisi tarif pemungutan

royalti apabila diperlukan, dengan tetap mengedepankan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan di industri musik.

"Langkah-langkah ini bertujuan menciptakan keseimbangan yang adil dan proporsional bagi seluruh pemangku kepentingan pencipta, penyanyi, pemilik master rekaman, penyelenggara, serta publik pengguna musik," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Once berharap penerapan sistem digital dalam pengelolaan royalti dapat segera diwujudkan demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan hak-hak pelaku musik tersampaikan secara tepat. Dengan dukungan teknologi dan koordinasi antar lembaga, ia optimistis ekosistem musik nasional dapat tumbuh sehat dan berkelanjutan, sekaligus memberi kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan lembaganya segera menerbitkan aturan baru untuk menyelesaikan polemik pembayaran royalti musik

yang belakangan menjadi sorotan publik. Dia menyebut pengumuman terkait aturan baru soal royalti segera disampaikan dalam waktu dekat.

"Tunggu pengumuman sehari dua hari ini," kata Dasco, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8/2025).

Dasco menilai penerapan aturan royalti yang ada saat ini sudah melampaui batas kewajaran. Padahal, kata dia, seharusnya hak cipta hanya diperuntukkan bagi penciptanya.

"Sebenarnya, kan, royalti hak cipta itu bukan untuk kepentingan selain daripada penciptanya begitu. Cuma penerapannya kemarin-kemarin itu kalau menurut saya di luar kewajaran," ucap Dasco.

Ketua Harian DPP Gerindra ini juga meminta agar para pelaku usaha maupun masyarakat tidak perlu khawatir untuk memutar musik. Dasco mengatakan pemerintah telah menyiapkan peraturan yang akan segera terbit untuk menyelesaikan polemik ini.

"Diputar saja (lagu). Ada peraturan menteri yang dibuat dan menurut saya itu hal yang masih wajar, tetapi sembari menunggu itu [pengumuman] jangan takut untuk memutar," tegas Dasco.

Salah satu opsi yang disiapkan DPR, disebut Dasco, melalui revisi Undang-Undang Hak Cipta. Dia menyebut lewat Kementerian Hukum, struktur dan komposisi LMKN sudah ditertibkan, sehingga tinggal menunggu pemberlakuan revisi.

"Kemarin Kementerian Hukum sudah menertibkan struktur dan komposisi LMKN dan aturannya menunggu UU Hak Cipta direvisi," jelasnya.

Seperti diketahui, polemik royalti musik menimbulkan keresahan di masyarakat. Banyak pelaku usaha seperti pemilik kafe, restoran, hingga usaha transportasi yang memilih untuk tidak lagi memutar musik agar terhindar dari kewajiban pembayaran royalti. (*)



Khusus royalti, ini lagi mau kami kumpulkan LMKN dan LMK-nya. Kami akan minta supaya akan ada audit, baik LMK-nya maupun LMKN-nya,"

**SUPRATMAN
ANDI AGTAS.**

Menteri Hukum



Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, saat mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: Arief/vel

Di tengah polemik umroh mandiri diperbolehkan atau tidak untuk dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dari pemerintah. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengharapkan RUU tersebut dapat segera diselesaikan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026.

Menurutnya, percepatan ini penting mengingat tahapan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 sudah mulai berjalan sejak tahun ini. "Revisi Undang-Undang Haji ini harus segera tuntas, karena waktunya berkejaran dengan siklus persiapan haji 2026. Mulai dari penyusunan database jemaah hingga proses pemesanan zona dan lokasi pemondokan, semua harus disiapkan sejak dini agar tidak menyulitkan jemaah," ujar Cucun dilansir perlementaria Selasa (19/8/2025).

Cucun menegaskan, DPR RI sebelumnya telah memberikan rekomendasi melalui Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji 2025. Ketua Timwas Haji 2025 DPR RI ini menekankan, langkah tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan untuk memperbaiki tata kelola haji ke depan. "Tidak perlu lagi kita perdebatkan. DPR sudah menunaikan fungsi pengawasan melalui rekomendasi Pansus Haji. Evaluasi kemarin jelas, dan kita rekomendasikan Pansus kembali di 2025 demi perbaikan. Apalagi sekarang penyelenggaraan haji tidak lagi di bawah Kementerian Agama, melainkan Badan Penyelenggara Haji," jelas Politisi Fraksi PKB ini.

Lebih lanjut, Cucun menyebutkan bahwa dalam draf revisi UU Haji masih terdapat dua opsi kelembagaan yang akan dibahas lebih lanjut, yakni tetap berbentuk badan atau ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji. "Kita lihat perkembangan dalam pembahasan di DPR, karena ada aspirasi dari sejumlah anggota untuk menjadikannya Kementerian Haji.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI,

Adies Kadir mengatakan pihaknya akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI setelah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dari pemerintah.

"Baru masuk DIM-nya, kita baru rapim kalau nggak nanti sore besok siang," kata Adies usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025) dikutip antara.

Dia mengatakan bahwa ada usulan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah terkait pembahasan RUU tersebut. Menurut dia, pembentukan kementerian itu akan mengurangi beban tugas Kementerian Agama yang selama ini menyelenggarakan pelayanan haji.

Sejauh ini, dia mengatakan bahwa penyelenggaraan haji dan umrah selalu bermasalah setiap tahunnya. Pada tahun lalu, DPR menggelar panitia khusus (pansus) untuk penyelenggaraan haji hingga kini

PIMPINAN DPR MINTA RUU HAJI DAN UMROH SEGERA TUNTAS

urusannya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Belum lagi hasil temuan daripada Timwas Haji yang kemarin terkait dengan banyaknya carut-marut terkait dengan pelayanan haji, baik itu syarikah, baik itu makannya, transport-nya, dan lain sebagainya," katanya.

Dia pun yakin pembentukan Kementerian Haji dan Umrah pun akan ditindaklanjuti hingga kantor wilayah (kanwil).

Berkaca pada pemisahan Kementerian Hukum dan HAM yang kini menjadi tiga kementerian, menurut dia, kanwil kementerian tersebut akan berjalan.



Revisi Undang-Undang Haji ini harus segera tuntas, karena waktunya berkejaran dengan siklus persiapan haji 2026. Mulai dari penyusunan database jemaah hingga proses pemesanan zona dan lokasi pemondokan, semua harus disiapkan sejak dini agar tidak menyulitkan jemaah,"

CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL

Wakil Ketua DPR RI

"Mungkin dari Direktorat Haji dan Umroh bisa ditarik ke Kementerian Agama kan juga berarti bisa langsung ada kanwil dan ada kantor-kantor di tingkat Kabupaten dan kota," kata dia.

Sebelumnya, Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (18/8).

Terkait dengan RUU tersebut, sebanyak 13 Asosiasi Haji dan Umroh menyatakan penolakan terhadap rencana legalisasi umroh mandiri dalam RUU itu. Juru Bicara 13 Asosiasi, Firman M Nur, menegaskan kebijakan tersebut dinilai minim perlindungan bagi jemaah dan berpotensi membuka peluang penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

"Kami khawatir akan hadir adalah oknum-oknum mungkin yang tidak bertanggung jawab," ujar Firman usai

pertemuan dengan Presiden PKS Almuzammil Yusuf di Jakarta Selatan, Senin (18/8/2025).

Ketua Umum DPP Amphuri ini menjelaskan, ibadah umroh berbeda dengan perjalanan ke luar negeri lainnya. Ada kebutuhan bimbingan keagamaan, jaminan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi jemaah.

Firman menekankan, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan keagamaan selama jemaah berada di Arab Saudi. Selain itu, PPIU juga terikat kewajiban akreditasi, pembayaran pajak, serta regulasi lainnya yang memberikan kontribusi bagi negara.

Terpisah, Pegiat Umroh Mandiri, Eaz Eryanda menanggapi penolakan 13 asosiasi penyelenggara haji dan umrah terhadap rencana legalisasi umroh mandiri dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Menurut dia, praktik umroh mandiri di lapangan selama ini tetap berjalan. Regulasi justru dibutuhkan agar lebih tertata dan memberikan kepastian hukum. "Umroh mandiri masih terus berjalan. Kalau bisa dimasukkan ke RUU, harapannya dirapikan prosedurnya agar lebih jelas dan sah," kata Eaz dilansir Republika, Selasa (19/8/2025).

Ia menilai, problematika umroh seperti jemaah terlantar, hotel tidak sesuai, maupun kasus overstay bukan hanya terjadi pada jemaah umroh mandiri, tetapi juga dialami jemaah yang berangkat melalui travel resmi. Karena itu, ia menekankan perlunya regulasi agar semua pihak, baik travel maupun jemaah mandiri, memiliki standar perlindungan yang sama.

"Di Saudi sendiri sebenarnya sudah rapi. Jemaah yang pakai visa umroh wajib punya transportasi resmi dan jika ada masalah kesehatan langsung ditangani, bahkan dijemput ambulans. Jadi kalau diatur di Indonesia, akan lebih baik lagi," ujar dia.

Terkait alasan penolakan asosiasi soal bimbingan ibadah, Eaz menilai hal tersebut bisa diatasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Menurut dia, banyak panduan umroh yang sudah tersedia secara daring, baik berupa teks maupun audiovisual. (rls,ist,ant/lut)



Demo warga Bone Tolak Kenaikan PBB-P2 berujung ricuh. (Dok. Istimewa)

Aksi warga menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di depan Kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan, berlangsung hingga malam hari dan ricuh, Selasa (19/8/2025).

Massa membakar ban bekas di depan kantor bupati, sehingga pihak kepolisian langsung mengerahkan mobil water cannon untuk membubarkan massa aksi.

Bentrokan dua kubu pun tak terelakkan. Personel kepolisian yang bergerak keluar dari halaman kantor Bupati Bone itu direspons massa melempari batu ke arah aparat.

Polisi kemudian meresponsnya dengan melepas tembakan gas air mata ke arah massa. Massa yang terdesak kemudian masuk ke dalam area Masjid Agung yang berjarak beberapa meter dari kantor Bupati Bone.

Massa bertahan hingga malam hari ingin bertemu dengan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman untuk membatalkan kenaikan PBB-P2. Mereka menyatakan kenaikan PBB di Kabupaten Bone yang dianggap menyengsarakan masyarakat.

Namun, hingga sore tadi Bupati Bone tidak kunjung menemui massa disebabkan sedang melaksanakan tugas di luar daerah.

"Kami meminta agar bupati dan wakil bupati untuk hadir di lokasi," kata orator aksi.

Pihak kepolisian melakukan pendekatan persuasif agar massa untuk tetap tenang dan melakukan aksi dengan aman dan damai.

"Peringatan kepada masyarakat ini telah menyalahi aturan. Ini sudah bukan aksi damai lagi," kata salah satu petugas kepolisian melalui pengeras suara.

Sejumlah kendaraan taktis telah disiagakan di dalam halaman kantor Bupati Bone dan sebanyak 1000 personel gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi tersebut.

Beberapa daerah juga sedang

gaduh ihwal kenaikan tarif PBB-P2, seperti Kota Cirebon, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Banyuwangi. Nominal persentase kenaikan tarif bervariasi, mulai dari ratusan persen hingga disebut mencapai 1.000 persen.

20 Daerah Kerek Tarif

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan ada 20 daerah yang mengerek tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di atas 100%. Salah satunya adalah Pati, Jawa Tengah.

Tito menjelaskan kenaikan PBB-P2 merupakan konsekuensi dari Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). UU itu

BERULANG RICUH DEMO KENAIKAN PBB, TERBARU DI BONE

KENAIKAN tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sedang menjadi perhatian masyarakat di sejumlah daerah. Hal itu bermula dari kebijakan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan tarif pajak di daerahnya sebesar 250 persen, tetapi pada akhirnya dibatalkan. Aksi warga pun merambat ke daerah lain. Terbaru kericuhan terjadi di Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel).

mengatur pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi di daerahnya. Aturan turunan dari UU HKPD, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2023 mengatur bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah termasuk NJOP serta PBB-P2 harus berlandaskan peraturan daerah (perda).

Kemudian, besaran tarifnya diatur dalam peraturan kepala daerah. Tito menyebut beberapa pemda yang menaikkan tarif PBB-P2 di daerahnya karena adanya penyesuaian NJOP yang dapat dilakukan setiap tiga tahun sekali. Penyesuaian NJOP itu mengikuti harga pasar, sehingga kemudian membuat PBB-P2 ikut terkereknaik.

"Tetapi ada klausul, yaitu harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua juga ada partisipasi dari masyarakat. Jadi harus mendengar suara publik juga," terangnya pada konferensi pers RAPBN 2026 di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Menurut mantan Kapolri itu, ada 20 daerah yang diketahuinya menaikkan tarif PBB-P2. Kenaikannya bervariasi antara kisaran 5% sampai dengan 10%, serta ada sejumlah daerah yang melampaui 100%. Jumlahnya mencapai 20 daerah. Salah satunya yakni Pati, yang belakangan ini menjadi sorotan publik karena menaikkan PBB-P2 hingga 250%. (wid,ist,ant/dya)

Pati Unjuk Rasa Lagi 25 Agustus, Desak Sudewo Dimakzulkan

AKSI unjuk rasa besar-besaran akan kembali terjadi di kawasan alun-alun Pati, Jawa Tengah, pada Senin (25/8/2025). Warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akan berunjuk rasa untuk mendesak DPRD Pati segera menuntaskan pembahasan Pansus Hak Angket dan memakzulkan Bupati Pati Sudewo.

Aksi lanjutan ini disampaikan oleh Ahmad Husein, yang sebelumnya dikenal sebagai inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang menggelar demo besar pada 13 Agustus 2025.

Berbeda dari aksi sebelumnya, Husein menyatakan dirinya kini membawa nama baru: Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu. "Namanya Masyarakat Pati Timur Bersatu. Tapi mewakili seluruh masyarakat Pati. Rencananya ada 50 ribu orang yang demo," ungkap Husein seperti dikutip, Selasa (19/8/2025).

Husein menegaskan, surat pemberitahuan ke Polresta Pati akan segera dikirimkan. Tujuannya jelas:

menuntut DPRD melengserkan Sudewo.

Husein membenarkan bahwa dia tidak lagi memakai nama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu karena kelompok tersebut telah membuat kesepakatan dengan Polresta Pati untuk tidak lagi melakukan aksi unjuk rasa sampai proses Pansus Hak Angket DPRD Pati selesai.

"Ada kesepakatan itu, jadi sekarang saya pakai nama berbeda," ujarnya. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh dua koordinator aliansi sebelumnya, Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, sebagai bagian dari permohonan pembebasan 22 pengunjuk rasa yang ditahan karena diduga memicu kericuhan saat aksi 13 Agustus.

Husein juga mengimbau agar peserta demo tidak bersikap anarkis dan tidak merusak fasilitas publik. Ia bahkan menyebut telah mendeteksi adanya rencana penyusupan dalam demo 25 Agustus mendatang. "Bahkan saya dengar akan ada penyusup yang bikin kericuhan dengan bawa bom molotov. Saya

harap jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau ada yang ricuh, Polresta Pati harus langsung tangkap," tegasnya.

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu telah mendirikan posko pengawalan Pansus Hak Angket di depan gerbang selatan Gedung DPRD Pati pada Senin (18/8/2025) petang. Posko ini dibentuk untuk mengawal proses pemakzulan Bupati Sudewo di DPRD, menampung aspirasi masyarakat, dan menyuarakan korban tindakan represif saat demo 13 Agustus.

"Kalau ada aksi lagi, bukan dikoordinasikan oleh aliansi kami. Fokus kami sekarang mengawal Pansus hak angket," kata Hanif.

Hanif juga menambahkan bahwa aliansi mereka berencana mendirikan posko pengawalan di KPK dan akan melakukan pengawalan langsung ke Jakarta terkait dugaan kasus korupsi Bupati Sudewo. "Akan ada yang berangkat ke Jakarta, tapi waktunya masih kami diskusikan," pungkas Hanif. (wid,ant,tri/dya)

KONTROVERSI MBG 'MAKAN' ANGGARAN PENDIDIKAN

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 tercatat tembus Rp 335 triliun. Mengejutkannya, dana tersebut bak 'memakan' separuh dana pendidikan, karena diambilkan dari anggaran bidang tersebut yang tahun depan senilai Rp 757,8 triliun.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudien meminta pemerintah mempertimbangkan ulang pengalokasian 44,2 persen anggaran pendidikan untuk makan bergizi gratis atau MBG. Menurut dia, proporsi anggaran yang terlalu besar pada satu program berisiko menciptakan ketimpangan dalam pembangunan sektor pendidikan secara keseluruhan.

"Proporsi hampir setengah dari total anggaran pendidikan untuk satu program saja menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan dengan kebutuhan mendesak lainnya di sektor pendidikan," kata Hetifah ketika dihubungi pada Selasa (19/8/2025).

Hetifah menekankan penggunaan anggaran harus diarahkan pada program-program yang menyentuh inti perbaikan mutu pendidikan, antara lain gaji dan kesejahteraan guru, peningkatan kompetensi, beasiswa, bantuan operasional, hingga penguatan pendidikan vokasi. "Ini harus jelas dan terukur," kata dia.

Tak hanya itu, Politikus Golkar ini mengingatkan pemerintah agar mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengalokasian anggaran 2026 tersebut. Putusan MK yang dimaksud ialah tentang penyelenggaraan pendidikan dasar gratis, baik di sekolah negeri maupun swasta. "Pemerintah juga harus memastikan distribusi bantuan berjalan merata," kata Hetifah.

Hetifah menegaskan pendidikan bukan hanya soal gizi, tetapi juga kualitas proses belajar mengajar dan kesiapan sumber daya manusia pendidik. Oleh sebab itu, Hetifah menilai penyusunan postur RAPBN 2026 yang diumumkan pemerintah pada Jumat, 15 Agustus lalu masih harus dimatangkan.

Ia berharap pelaksanaan program makan bergizi gratis yang bertujuan meningkatkan gizi siswa itu tetap beriringan dengan agenda peningkatan mutu pendidikan. "Sehingga anggaran besar yang digelontorkan benar-benar menjadi investasi jangka panjang bagi masa depan generasi bangsa," kata Hetifah.

Adapun pemerintah mengalokasikan Rp 757,8 triliun untuk sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026. Dalam pembacaan nota keuangan di sidang paripurna DPR Jumat siang, 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto mengatakan jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan mandatory spending yakni 20 persen dari total APBN di tahun itu.

Hanya saja, dari total tersebut sebesar 44,2 persen dialokasikan untuk membiayai program makan



(Ilustrasi) Perugas menata makan bergizi gratis (MBG) yang akan dibagikan ke siswa. (dok.ant)

bergizi gratis atau MBG, yakni sebanyak Rp 335 triliun. Nominal itu digunakan untuk memberi makan 82,9 juta penerima manfaat dan 30 ribu dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kesejahteraan Guru Terlupakan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya Achmad Hidayatullah, juga menyayangkan upaya meningkatkan gizi murid lewat program MBG, diambil dari anggaran pendidikan hingga memakan 44,2 persen dari total keseluruhan.

"Artinya, sebetulnya anggaran

pendidikan yang langsung, seperti untuk beasiswa, kesejahteraan guru dan dosen, anggaran riset, serta infrastruktur, masih kecil," jelas Dayat.

Hidayat menegaskan bahwa alokasi untuk pendidikan perlu benar-benar mencapai 20 persen dari total belanja negara dalam APBN.

"Selama ini bukan rahasia, dukungan infrastruktur dan sumber daya untuk daerah tertinggal masih belum berhasil dengan baik. Kesejahteraan guru juga masih jauh untuk dikatakan tercapai. Anggaran riset untuk sektor perguruan tinggi juga masih kecil dan berat dalam administrasi," ucapnya. (wid,rls,ist/dya)

Mendiksasmen Enggan Menjawab, Bos BGN Klarifikasi

MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti tidak banyak bicara saat ditanya soal anggaran pendidikan nasional 2026 yang lebih banyak dialokasikan untuk program makan bergizi gratis. Abdul Mu'ti hanya mengatakan penentuan soal anggaran masih dalam proses.

Abdul Mu'ti mulanya enggan berkomentar soal alokasi anggaran tersebut. Namun, saat dimintai tanggapan soal pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara, Abdul Mu'ti baru menjawab dan mengatakan, "Soal anggaran nanti saja ya. Masih dalam pembahasan lagi," katanya saat ditemui dalam peresmian Program Gerakan Numerasi di SDN Meruya Selatan 04, Jakarta Barat, pada Selasa (19/8/2025).

Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, anggaran MBG di dalam RAPBN 2026 senilai Rp335 triliun merupakan alokasi gabungan yang

berasal dari anggaran pendidikan dan kesehatan. Dia mengataman anggaran jumbo yang diterima untuk pelaksanaan program MBG bukan hanya berasal dari pendidikan.

"Berasal dari mana [anggaran MBG untuk 2026], ternyata masuk di dalam dua fungsi, kesehatan dan pendidikan. Jadi total Rp335 triliun nanti yang dari kesehatannya itu kurang lebih sekitar antara Rp24 triliun atau Rp27 triliun. Jadi bukan Rp335 triliun dari pendidikan tok. Jadi Rp335 triliun itu adalah total yang akan kami gunakan," jelas Dadan saat ditemui di Kantor Berita Antara, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Dadan menyatakan BGN hanya menerima mandat untuk menghitung seberapa besar kebutuhan anggaran dalam menjalankan program MBG di tahun depan. Berdasarkan estimasinya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto bakal menelan anggaran senilai Rp335 triliun pada 2026. "Terkait

PENERIMA MANFAAT ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN 2026 (RP757,8 T)

RP401,5 T

UNTUK SISWA/MAHASISWA

- Bidikmisi/KIP Kuliah Rp17,2 T
1,1 juta siswa
- Beasiswa (LPDP) Rp25,1 T
40.000 mahasiswa
- Program Indonesia Pintar (PIP) Rp15,8 T
21,1 juta siswa
- Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp339,3 T
44,8 juta siswa di 300.000 SPPG

RP178,7 T

UNTUK GURU/DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKAN

- TPG Non PNS Rp19,6 T → 754.747 guru
- TPG ASN Daerah Rp68,7 T → 1,6 juta guru
- TPG ASN Pusat Rp3,3 T
- TPG PNS Daerah Non Guru Rp1,6 T
- Tunjangan Profesi Dosen Rp6,7 T
- Tunjangan Khusus Rp2,9 T

RP150,1 T

UNTUK SEKOLAH/KAMPUS

- Sekolah Rakyat Rp24,9 T
Pembangunan 200 lokasi (Rp2,0 T),
Dana BOS Rp22,9 T
- BOS & BOP PAUD Rp51,7 T
- BOS Dikdasmen Rp36,1 T
- Renovasi Madrasah & Sekolah
Rp2,5 T (850 madrasah, 11.686 sekolah)
- BOPTN Rp9,4 T (201 PTN/Lembaga)
- Sekolah Unggulan Rp3 T (Desain unggul,
9 lokasi Garuda)

dengan anggaran, ini terus terang wilayahnya Pak Presiden, Badan Gizi ini hanya diberi [dan] ditanya [oleh Presiden Prabowo Subianto] berapa uang yang dibutuhkan untuk makan bergizi dengan asumsi yang demikian saya katakan Rp335 triliun," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari produk domestik bruto (PDB) merupakan penambahan dana MBG. Meski begitu, menurutnya, program MBG tidak akan mengganggu anggaran pendidikan ke depan.

"Jadi ada yang kenaikan di pendidikan yang tahun ini, yang sebetulnya tahun lalu belum ada. Jadi kenaikannya itu dialokasikan untuk makan bergizi. Jadi sebenarnya hampir tidak mungkin tidak mengganggu yang sudah ada sebelumnya," tuturnya. (wid,rls,ant/dya)

DPRD KOTA MALANG KRITISI BELUM TERBITNYA PERWALI TARIF PBB



Anggota DPRD Kota Malang, Dwicki Salsabil Fauza. (Santi/Lentera)

MALANG- DPRD Kota Malang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) setempat untuk segera menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait pengenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

"Karena memang dalam pembahasan saat panitia khusus (Pansus) Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Nomor 4 Tahun 2023 menjadi Perda 1 tahun 2025, itu disepakati implementasi kenaikan tarif tersebut harus berpedoman pada

Perwalk," ujar Anggota Fraksi Nasdem-PSI DPRD Kota Malang, Muhammad Dwicki Salsabil Fauza, Selasa (19/8/2025).

Dwicki menjelaskan, Perda Kota Malang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan perubahan dari Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang PDRD.

Perubahan ini menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai penerapan single tarif PBB. Jika sebelumnya

berlaku multi tarif, menurutnya, kini tarif maksimal PBB untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp100 miliar yang semula 0,167 persen dibulatkan menjadi 0,2 persen dalam Perda terbaru.

Menurut Dwicki, selain telah menjadi kesepakatan Pansus, aturan mengenai dasar pengenaan tarif PBB yang baru memang harus dituangkan dalam Perwal. Hal itu sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Nah, menurut UU HKPD, sebelum melaksanakan pemungutan kepada wajib pajak harus ada dasar pengenaan PBB-P2 yang diatur dalam Perwali. Sehingga memang menunggu terbitnya Perwalk dan ini harus segera," jelasnya.

Dengan demikian, ditegaskan Dwicki, tarif yang tercantum dalam Perda tidak serta-merta dapat langsung diimplementasikan. Perwal dibutuhkan untuk mengatur mekanisme pemungutan secara lebih rinci.

"Artinya, tarif PBB di Perda 1 Tahun 2025 bukan menjadi satu-satunya pedoman. Jadi patokannya bukan hanya perkalian tarif," tambahnya.

Dicontohkannya, Perwali 1/2025 tentang PDRD, nantinya akan mengatur lebih detail dasar pengenaan NJOP sebelum tarif dikalikan. Dengan begitu, tarif PBB sebesar 0,2 persen tidak otomatis langsung dikalikan dengan NJOP.

"Misalnya, objek dengan nilai NJOP di bawah Rp1 miliar diberikan dasar pengenaan hanya 20 persen dari NJOP. Nilai NJOP setelah perkalian dasar

pengenaan inilah yang nanti akan dikenakan tarif PBB sebesar 0,2 persen," jelasnya.

Dwicki menilai mekanisme tersebut merupakan bentuk kebijakan fiskal yang bijaksana. Pertimbangannya adalah agar penerapan single tarif tidak membebarkan masyarakat kecil, namun tetap memberikan kontribusi optimal dari wajib pajak dengan NJOP besar.

Sebagai perbandingan, dijelaskannya, pada Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023, tarif PBB sebelumnya dibagi menjadi empat klasifikasi. Yakni NJOP Rp0 sampai Rp1,5 miliar sebesar 0,055 persen, NJOP Rp1,5 miliar sampai Rp5 miliar sebesar 0,112 persen, NJOP Rp5 miliar sampai Rp100 miliar sebesar 0,145 persen, dan NJOP di atas Rp100 miliar sebesar 0,167 persen.

"Makanya, untuk implementasinya adalah mengacu di Pasal 7 ayat 5. Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud di ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 persen dan paling tinggi 100 persen dari NJOP. Ini ada di UU HKPD serta turunan di Perda Kota Malang terkait PDRD," jelas Dwicki.(Santi/Dya)

DESA PENDEM RAIH PERINGKAT I BBGRM 2025: KUNCINYA KOMUNIKASI DAN PARTISIPASI WARGA

BATU - Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, berhasil meraih peringkat pertama dalam penilaian program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kota Batu tahun 2025. Keberhasilan ini diraih berkat terjaganya komunikasi antar lembaga, serta tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu, Ririk Mashuri, menjelaskan BBGRM merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan di seluruh desa dan kelurahan. Tujuannya untuk memperkuat persatuan masyarakat sekaligus menumbuhkan peran aktif warga dalam pembangunan.

"BBGRM dilaksanakan setiap bulan Mei dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Semua elemen terlibat, mulai dari LPMD, PKK, Karangtaruna, RT/RW, hingga masyarakat umum," ujar Ririk, ditemui usai Upacara HUT ke 80 Kemerdekaan

RI, Minggu (17/8/2025).

Menurutnya, penilaian dilakukan melalui tiga tahap, yaitu administrasi, paparan, dan klarifikasi lapangan. Hasilnya, Desa Pendem memperoleh nilai tertinggi, yakni 392,9, disusul Desa Sidomulyo dengan 358,2, dan Desa Bumiaji dengan 246,1.

Penghargaan tersebut diberikan bersamaan dengan upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Kota Batu. Selain penghargaan, menurut Ririk, Pemkot Batu juga menyerahkan uang pembinaan. Di mana Desa Pendem sebagai peringkat pertama mendapat Rp2 juta, Sidomulyo Rp1,5 juta, dan Bumiaji Rp1 juta.

Ririk menambahkan, salah satu faktor pembeda Desa Pendem dibanding desa lain adalah tingkat partisipasi masyarakatnya.

"Pada prinsipnya, bidang yang dinilai sama, mulai dari kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan keagamaan, hingga kesehatan dan lingkungan. Namun

Desa Pendem lebih unggul dalam partisipasi masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Pendem, Wahyu Irzaudin, mengungkapkan kunci keberhasilan desanya adalah komunikasi yang terjaga baik antar lembaga.

"Kami selalu melakukan kegiatan dengan saling support. Setiap kegiatan selalu kami komunikasikan, baik dengan PKK, Karangtaruna, maupun kelompok masyarakat lain," katanya.

Wahyu mencontohkan, pendampingan kepada PKK dilakukan melalui program pemilahan sampah hingga kelompok tani. Sementara bersama Karangtaruna, LPMD mendukung kegiatan pemuda seperti gerak jalan hingga festival tabebuya.

Hal senada juga disampaikan Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Desa



Kasi Kesra Desa Pendem, M Solihin menerima penghargaan Desa Terbaik program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 2025, Minggu (17/8/2025). (dok. Prokopim Kota Batu)

Pendem, Muhammad Solihin. Ia menyebut keberhasilan desa tidak lepas dari keterlibatan semua unsur masyarakat.

"Pemuda, PKK, Linmas, masyarakat, RT/RW, semuanya terlibat mendukung kegiatan ini. Kami dari pemerintah desa juga mendukung penuh melalui Dana Desa," jelasnya. (Santi/Dya)



Presiden Venezuela Nicolas Maduro melambaikan tangan kepada para pendukungnya pada 22 Mei 2025, di Caracas, dalam rapat umum penutup untuk pemilihan kongres dan daerah yang diadakan tiga hari kemudian. (Foto: AP)

MADURO LAWAN BALIK TRUMP, JUTAAN MILISI DIKERAHKAN

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, menyatakan akan menurunkan sekitar 4,5 juta anggota milisi sebagai bentuk respons terhadap apa yang ia sebut sebagai "ancaman" dari Amerika Serikat (AS). Langkah ini diambil setelah Washington meningkatkan tawaran hadiah bagi pihak yang berhasil menangkap Maduro serta melancarkan operasi antinarkoba di wilayah Karibia.

Pekan ini, saya akan mengaktifkan rencana khusus dengan lebih dari 4,5 juta anggota milisi untuk memastikan cakupan seluruh wilayah nasional milisi yang dipersiapkan, diaktifkan, dan dipersenjatai," kata Maduro dalam pengumuman yang disiarkan televisi pemerintah, dikutip dari AFP, Selasa (19/8/2025).

ini, Maduro berterima kasih kepada pihak-pihak yang menyatakan dukungan dalam menghadapi apa yang disebutnya sebagai "seruan ancaman yang buruk".

Maduro mendesak basis politik pemerintahannya untuk terus maju dengan pembentukan milisi petani dan buruh "di semua sektor".

"Senapan dan rudal untuk pasukan petani! Untuk mempertahankan wilayah, kedaulatan, dan perdamaian Venezuela," tegas Maduro.

Meskipun tekanan semakin meningkat, pemimpin Venezuela menyatakan rasa terima kasihnya kepada suara-suara internasional yang telah menentang sikap AS, dan

menepis retorika Washington sebagai "kalimat yang buruk".

Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum bulan ini menolak tuduhan AS yang menghubungkan Maduro dengan Kartel Sinaloa Meksiko, dan mengatakan pemerintahnya tidak memiliki bukti adanya hubungan tersebut. (AFP, Al Jazeera, Bloomberg, ist/nei)

Data resmi menyebutkan bahwa milisi Venezuela, yang dibentuk oleh pendahulu Maduro, mending Hugo Chavez, beranggotakan sekitar 5 juta personel meskipun jumlah sebenarnya diyakini lebih kecil dari itu. Total populasi Venezuela sendiri mencapai sekitar 30 juta jiwa.

Maduro, dalam pernyataannya, mengecam "munculnya kembali ancaman yang berlebihan, aneh, dan tidak masuk akal" dari AS.

Awal bulan ini, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menggandakan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro, yang menghadapi tuduhan perdagangan narkoba, menjadi US\$ 50 juta, atau setara Rp 812,4 miliar.

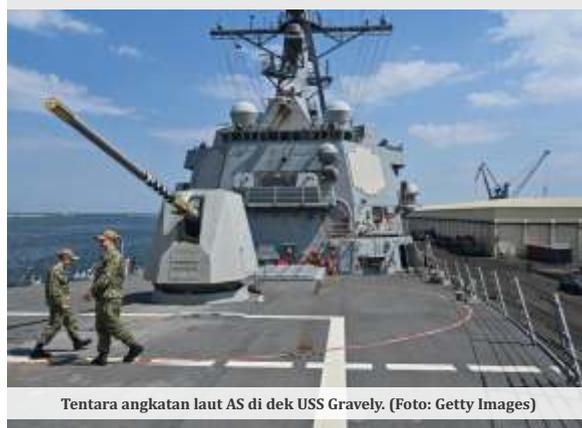
Washington, yang tidak mengakui kemenangan Maduro dalam dua pemilu sebelumnya, menuduh sang Presiden Venezuela memimpin geng penyelundup kokain bernama "Cartel de los Soles". Pemerintahan Trump telah mengumumkan sanksi terhadap kelompok tersebut dan terhadap pemerintahan Maduro bulan lalu.

Militer AS juga dilaporkan mengerahkan beberapa kapal ke kawasan Karibia bagian selatan, sebagai bagian dari tindakan keras Trump terhadap kartel narkoba Amerika Latin.

Pengerahan serupa juga dilakukan oleh otoritas Caracas. "Kami mengerahkan ke seluruh Karibia... di laut kami, properti kami, wilayah Venezuela," kata Menteri Dalam Negeri Venezuela, Diosdado Cabello.

Meskipun tidak secara spesifik membahas soal tindakan AS baru-baru

Tiga Kapal Perusak AS Dekati Venezuela



Tentara angkatan laut AS di dek USS Gravely. (Foto: Getty Images)

TIGA kapal perusak berpeluru kendali milik Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan tiba di perairan lepas pantai Venezuela dalam waktu 36 jam. Seorang sumber pada Senin (18/8/2025) mengungkapkan bahwa pengerahan tersebut merupakan bagian dari langkah Washington untuk menghadapi ancaman kartel narkoba di Amerika Latin.

Sebelum kabar pengerahan kapal perang, Presiden Donald Trump menyatakan akan mengerahkan kekuatan militer untuk memburu geng narkoba Amerika Latin. Saat ini AS sudah memasukkan geng narkoba Amerika Latin, termasuk kelompok kriminal Tren de Aragua ke dalam daftar hitam terorisme.

Sumber tersebut menyebut tiga kapal perang yang bergerak menuju Venezuela adalah USS Gravely, USS Jason Dunham, dan USS Sampson.

Sumber lain kepada kantor berita Reuters menyampai-kan, ada sekitar 4.000 pelaut dan marinir yang sudah berkomitmen pada misi di kawasan tersebut.

Terpisah, pejabat AS yang meminta namanya disamarkan, mengungkapkan aset militer seperti pesawat pengintai P-8, kapal perang lainnya dan kapal selam serang juga akan dikerahkan sebagai tenaga tambahan.

Dia menambahkan, proses lanjutan akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Mereka akan dikerahkan ke wilayah udara dan perairan internasional di kawasan Amerika Selatan.

"Aset angkatan laut tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk melakukan operasi intelijen dan pengawasan, tetapi juga sebagai landasan peluncuran serangan terarah jika keputusan telah dibuat," kata pejabat tersebut seperti dikutip dari Reuters

pada Selasa (19/8/2025).

Terkait pengerahan kapal perang, Kementerian Komunikasi Venezuela menolak berkomentar.

Sedangkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada hari yang sama mengeluarkan pernyataan akan mempertahankan kedaulatan Venezuela tanpa menyebut adanya ancaman kapal perang AS.

"Venezuela akan mempertahankan laut kami, udara kami dan tanah kami, dari ancaman yang aneh dan ganjil, dari kekaisaran yang sedang merosot," kata Maduro.

Trump telah menjadikan tindakan keras terhadap kartel narkoba sebagai tujuan utama pemerintahannya sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membatasi migrasi dan mengamankan perbatasan selatan AS.

Pemerintahan Trump dalam beberapa bulan terakhir telah mengerahkan setidaknya dua kapal perang untuk membantu upaya keamanan perbatasan dan perdagangan narkoba.

Pemerintahan Trump menetapkan Kartel Sinaloa Meksiko dan geng narkoba lainnya, serta kelompok kriminal Venezuela Tren de Aragua, sebagai organisasi teroris global pada bulan Februari, saat meningkatkan penegakan hukum imigrasi terhadap tersangka anggota geng. (Reuters, Marinelink, ist/nei)

Pakar Gizi IPB : Bahaya di Balik Mi Campur Nasi

Mengonsumsi mi bersama nasi sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang Indonesia. Kombinasi dua sumber karbohidrat ini sering dipilih karena dianggap mampu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Walau tidak berbahaya jika hanya sesekali dikonsumsi, terlalu sering makan mi campur nasi dapat menimbulkan risiko ketidakseimbangan gizi.

"Kombinasi ini berisiko menimbulkan ketidakseimbangan gizi dan berbagai gangguan kesehatan jika tidak diimbangi dengan asupan gizi lain," ucap Dosen Program Studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi, Sekolah Vokasi Universitas IPB, Rosyda Dianah, SKM, MKM, dikutip dari laman resmi IPB University, Senin (18/8/2025).

Berdasarkan perhitungan, konsumsi 150 gram nasi dan 100 gram mi menghasilkan sekitar 401 kkal energi, 82 gram karbohidrat, 7 gram protein, dan 2 gram lemak.

"Kandungan ini tidak seimbang dan jauh dari konsep 'Isi Piringku', yakni 50 persen sayur dan buah, serta 50 persen sisanya gabungan karbohidrat dan protein," jelasnya.

Risiko Kesehatan

Rosyda menjelaskan bahwa konsumsi nasi dan mi secara bersamaan dalam jangka panjang berisiko memicu berbagai gangguan metabolik seperti obesitas, resistensi insulin, dislipidemia, dan bahkan inflamasi kronis.

Kelahiran karbohidrat sederhana dari nasi putih dan mi instan dapat meningkatkan indeks glikemik dan mempercepat lonjakan gula darah. Jika tidak dibarengi asupan protein dan serat yang cukup, efeknya bisa jangka panjang.

Ia juga menambahkan bahwa kekurangan asupan protein dan lemak sehat dapat menyebabkan rendahnya hormon pengatur nafsu makan seperti leptin dan peptida YY. Dampaknya, rasa lapar berulang, mengarah pada konsumsi kalori berlebih (overeating), terutama dari sumber karbohidrat sederhana.

Untuk menghindari risiko tersebut, Rosyda menyarankan beberapa alternatif menu yang tetap mengenyangkan tanpa menumpuk karbohidrat, seperti kombinasi nasi setengah porsi dengan lauk (hewani dan nabati) serta sayur; ubi rebus

dengan sumber protein hewani (misal telur), protein nabati (misal kacang-kacangan) dan sayuran; atau menu rendah karbohidrat seperti mi shirataki dengan sumber protein ditambah sayuran.

"Prinsipnya adalah menyeimbangkan piring makan sesuai dengan pedoman Isi Piringku. Pastikan karbohidrat tidak lebih dari seperempat bagian piring dan lengkapi dengan protein, lemak sehat, serta serat dari sayuran dan buah," tandasnya.

Batas Aman Konsumsi

Mi instan umumnya mengandung berbagai bahan, termasuk karbohidrat, lemak, protein, dan natrium. Selain itu, ada juga bahan tambahan seperti pengawet, pewarna, dan perasa buatan.

Salah satu perhatian utama terkait mi instan adalah tingginya kadar natrium atau garam, yang berdampak negatif pada kesehatan jika dikonsumsi berlebihan. Selain itu, mi instan juga cenderung rendah serat, vitamin, dan mineral, sehingga kurang memenuhi kebutuhan gizi harian yang seimbang. Untuk mengurangi risiko kesehatan, penting untuk mengetahui batas aman dalam mengonsumsi mi instan.

Berdasarkan rekomendasi dari ahli gizi, sebaiknya konsumsi mi instan dibatasi, maksimal 1-2 kali per minggu saja. Tujuannya, untuk memastikan bahwa asupan natrium dan bahan kimia tambahan tetap dalam batas aman dan tidak menumpuk di dalam tubuh. Harus Tahu, Ini 7 Bahaya Makan Mi Instan Terlalu Sering yang perlu di waspadai. Selain itu, penting untuk mengimbangnya dengan pola makan yang sehat dan seimbang, yang kaya akan buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan protein.

Tips Sehat Makan Mie Instan

Walaupun mi instan memiliki beberapa risiko kesehatan jika dikonsumsi berlebihan, ada cara untuk menikmatinya dengan lebih sehat.

Berikut adalah beberapa tips untuk mengurangi dampak negatif mi instan dan membuatnya lebih bernutrisi:

Kurangi Penggunaan Bumbu

Salah satu sumber utama natrium dalam mi instan berasal dari paket bumbu yang biasanya disertakan. Kandungan garam di dalamnya cukup tinggi, sehingga berisiko menambah asupan natrium berlebihan jika digunakan seluruhnya. Untuk mengurangi dampak tersebut, bisa memakai hanya sebagian bumbu atau bahkan tidak menggunakannya sama sekali.

Sebagai gantinya, bisa menambahkan bumbu alami seperti bawang putih, bawang merah, cabai, atau berbagai rempah-rempah lain sesuai selera. Cara ini bukan hanya membantu mengurangi konsumsi natrium, tetapi juga menghadirkan rasa yang lebih segar, alami, dan menyehatkan pada mi instan yang dibuat.

Tambahkan Sayuran dan Protein

Untuk meningkatkan nilai gizi mi instan, bisa menambahkan berbagai sayuran segar seperti bayam, sawi, wortel, atau brokoli. Sayuran tersebut mengandung serat, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan serta membantu sistem pencernaan tetap optimal. Selain membuat mi instan lebih sehat,

tambahan sayuran juga memberikan rasa dan tekstur yang lebih nikmat.

Tak hanya itu, juga bisa melengkapinya dengan sumber protein seperti telur, tahu, tempe, atau daging tanpa lemak agar hidangan menjadi lebih seimbang. Kombinasi karbohidrat dari mi, serat dari sayuran, dan protein dari lauk tambahan akan membuat tubuh memperoleh energi sekaligus nutrisi yang lebih lengkap. Dianggap bikin gemuk, sebenarnya berapa kalori yang terkandung dalam mi instan? Ketahui selengkapnya.

Pilih Mi Instan yang Lebih Sehat

Saat ini, banyak produsen mi instan yang mulai menghadirkan varian lebih sehat untuk menjawab kekhawatiran konsumen. Beberapa di antaranya menawarkan mi dengan kandungan serat lebih tinggi atau mi yang dibuat dari biji-bijian utuh, sehingga lebih ramah bagi pencernaan dan membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Inovasi ini menjadi langkah positif agar mi instan tidak hanya praktis, tetapi juga lebih bernutrisi.

Hindari Menggoreng Ulang

Menggoreng mi instan setelah dimasak dapat meningkatkan jumlah kalori dan lemak jenuh yang tidak sehat, sehingga sebaiknya mi instan cukup direbus sesuai petunjuk pada kemasan agar terhindar dari tambahan lemak yang tidak diperlukan. (nei,ist/dya)



AI BIKIN NGERI, MAHASISWA MIT PUTUSKAN DROP OUT

Mahasiswa Massachusetts Institute of Technology (MIT) memilih keluar dari kampus karena diliputi rasa khawatir terhadap perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Mereka menilai laju inovasi di bidang ini begitu cepat dan membawa dampak yang belum sepenuhnya dipahami, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang arah masa depan manusia. Fenomena ini menunjukkan bahwa kecemasan terhadap AI tidak hanya datang dari kalangan masyarakat umum, tetapi juga dari lingkungan akademik yang justru menjadi pusat pengembangan teknologi tersebut.

Salah satu yang mengambil langkah tersebut adalah Alice Blair, mahasiswa yang masuk MIT pada 2023. Ia memutuskan berhenti kuliah karena merasa masa depan umat manusia terancam oleh kehadiran artificial general intelligence

(AGI), yakni bentuk kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan berpikir dan belajar layaknya manusia. Menurutnya, risiko yang ditimbulkan terlalu besar sehingga ia tidak lagi yakin melanjutkan pendidikannya di bidang yang berhubungan erat dengan teknologi tersebut.

"Saya khawatir tidak bisa hidup sampai lulus kuliah karena AGI. Dalam sebagian besar skenario, cara kita mengembangkan AGI justru berujung pada kepunahan manusia," kata Blair melansir laman Futurism pada Senin (18/8/2025).

Kini Blair bekerja sebagai penulis teknis di lembaga nirlaba Center for AI Safety dan tidak berencana kembali ke MIT.

Dia mengaku sempat berharap bisa menemukan komunitas yang sama-sama peduli pada isu keamanan AI, tetapi pada akhirnya memilih melanjutkan perjalanannya di luar kampus.

Pilihan Blair mendapat simpati dari Nikola Jurković, alumni Harvard yang pernah aktif dalam klub keselamatan AI di kampusnya, karena ia menilai keputusan tersebut lahir dari kesadaran akan risiko besar yang bisa ditimbulkan oleh kecerdasan buatan, terutama artificial general intelligence (AGI), terhadap masa depan manusia.

"Kalau kariernu akan digantikan otomatisasi pada akhir dekade ini, setiap tahun di bangku kuliah sama saja mengurangi waktu dari karier singkatmu," katanya.

Jurković bahkan memperkirakan AGI akan hadir dalam empat tahun ke depan, diikuti otomatisasi penuh dalam lima hingga enam tahun. AGI sendiri dipandang sebagai tujuan akhir banyak perusahaan teknologi, yakni menciptakan sistem yang bisa menandingi atau melampaui kecerdasan manusia.

CEO OpenAI, Sam Altman, bahkan menyebut peluncuran GPT-5 sebagai langkah besar menuju artificial general intelligence (AGI),

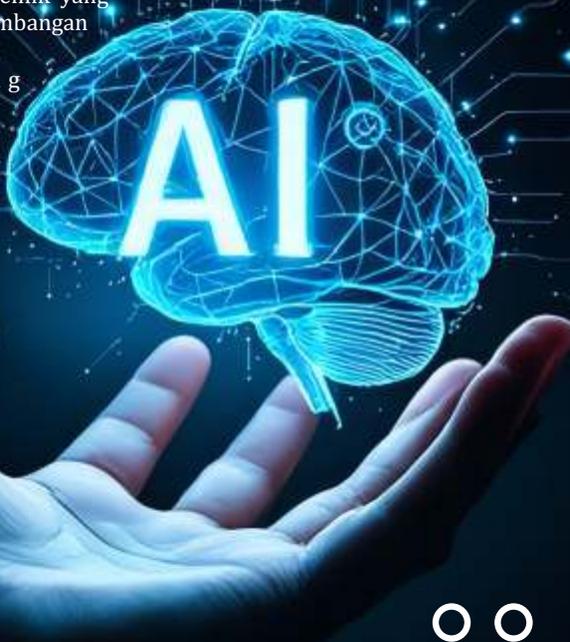


dan meski menuai banyak kritik, ia berani menyatakan bahwa model tersebut sudah memiliki kecerdasan yang bisa dianggap umum.

Namun, sejumlah pakar menilai pernyataan tersebut berlebihan, salah satunya Gary Marcus, peneliti AI sekaligus kritikus industri, yang berpendapat bahwa teknologi itu masih jauh dari kata sempurna dan belum dapat benar-benar disamakan dengan kecerdasan manusia.

"Sangat kecil kemungkinan AGI hadir dalam lima tahun ke depan. Itu hanya jargon pemasaran, padahal banyak masalah mendasar seperti halusinasi dan kesalahan penalaran yang belum terpecahkan," ujarnya.

Marcus juga menekankan, meski AI memang membawa banyak dampak negatif mulai dari hilangnya pekerjaan, perusakan lingkungan, hingga penyebaran misinformasi, risiko kepunahan manusia akibat AGI masih sangat jauh dari kenyataan. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **INIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Outfit Andalan Sesuai Kepribadian MBTI

Fashion tidak hanya soal mengikuti tren atau penampilan luar, tetapi juga menjadi cara untuk menunjukkan jati diri. Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda, dan pilihan pakaian sering kali menjadi cerminan dari karakter tersebut. Karena itu, tak mengherankan jika kini banyak orang mengaitkan gaya berpakaian dengan hasil tes kepribadian MBTI (Myers-Briggs Type Indicator).

Menurut berbagai sumber, termasuk Ultima II, memahami kepribadian melalui MBTI dapat menjadi cara seru untuk menemukan gaya berpakaian yang bukan hanya nyaman, tetapi juga mencerminkan identitas diri. Baik kamu seseorang yang kalem dan introvert, maupun sosok yang energik dan ekspresif. Yuk, simak penjelasannya berikut ini! Yuk, simak penjelasannya berikut ini!

ISTJ

ISTJ adalah pribadi yang sistematis dan disiplin. Gaya berpakaian mereka pun mencerminkan kebutuhan akan struktur dan kepraktisan. Outfit yang cocok untuk ISTJ adalah busana dengan potongan klasik seperti kemeja putih bersih, blazer tailored, celana panjang berbahan katun, dan sepatu loafers. Pilih warna netral seperti abu-abu, navy, atau krem yang timeless dan mudah dipadukan.

ISFJ

ISFJ cenderung peduli dan penyayang, sehingga gaya mereka mencerminkan kelembutan. Dress berbahan ringan dengan motif floral, blus berenda, dan rok A-line cocok untuk menggambarkan sisi empati mereka. Pilihan warna pastel seperti lavender, baby blue, atau peach membuat penampilan ISFJ terlihat manis dan hangat.

INFJ

INFJ dikenal idealis dan visioner. Mereka menyukai fashion yang memiliki makna dan cerita. Gaya yang cocok untuk INFJ mencakup potongan unik seperti outerwear asimetris, rok flowy, atau atasan dengan tekstur khas. Warna seperti dusty rose, burgundy, atau sage green menonjolkan sisi mendalam mereka. Tambahkan aksesoris artistik seperti scarf bermotif.

INTJ

Sebagai pemikir logis dan mandiri, INTJ lebih suka tampilan yang efisien

dan tak berlebihan. Gaya minimalis modern dengan palet monokrom, potongan clean, dan struktur tegas cocok untuk mereka. Kamu bisa padukan oversized blazer dengan wide-leg pants dan sepatu boots berdesain simpel.

ISTP

ISTP adalah tipe yang spontan dan fleksibel. Mereka suka outfit yang fungsional namun tetap keren. Coba padukan jaket bomber dengan kaus polos dan jeans high-waist. Tambahkan sneakers dan ransel praktis sebagai pelengkap. Warna-warna netral dengan aksen bold seperti hijau zaitun atau oranye cocok untuk menunjukkan jiwa petualangnya.

ISFP

ISFP menyukai keindahan dan keaslian. Gaya mereka sering bernuansa bohemian dengan sentuhan feminin. Rok flowy, blouse dengan detail renda, tas rotan, dan sandal kulit menjadi pilihan andalan. Warna-warna hangat seperti terracotta, mustard, atau forest green mencerminkan kecintaan mereka pada alam dan seni.

INFP

INFP dikenal intuitif dan imajinatif. Mereka suka busana dengan vibe nostalgia dan penuh makna. Coba tampil dengan dress vintage bermotif bunga kecil, sweater rajut oversized, dan sepatu Mary Jane. Warna-warna seperti blush pink, maroon, atau dusty blue cocok dengan kepribadian mereka yang hangat namun introvert.

INTP

Sebagai pemikir bebas, INTP cenderung menyukai outfit yang nyaman. T-shirt grafis, outerwear oversized, dan celana kulot dengan sepatu sneaker chunky adalah kombinasi pas. Aksen layering atau sentuhan futuristik cocok dengan gaya berpikir analitis mereka.

ESTP

ESTP menyukai tantangan dan tampil mencolok. Mereka cocok dengan gaya sporty chic. Coba padukan crop

top dengan jogger pants dan jaket kulit. Pilih warna-warna berani seperti merah, oranye neon, atau fuchsia. Aksesoris edgy seperti kacamata hitam besar dan sepatu platform juga akan melengkapi kesan yang fearless.

ESFP

ESFP suka menjadi pusat perhatian. Fashion mereka selalu menyenangkan dan penuh warna. Mini dress penuh payet, atasan satin, rok kulit, dan high heels adalah pilihan outfit yang tepat. Pilih warna-warna menyala seperti electric blue, gold, atau pink terang untuk mencuri perhatian di mana pun kamu berada.

ENFP

ENFP adalah tipe yang menyukai petualang dalam dunia fashion. Mereka suka bereksperimen dengan motif dan warna. Coba mix and match kaus bergambar, jaket warna-warni, rok motif, dan aksesoris quirky.

ENTP

ENTP senang tampil beda. Mereka selalu jadi yang pertama mencoba tren baru. Gaya streetwear atau fashion futuristik cocok banget buat mereka. Oversized blazer berwarna neon, sepatu platform transparan, atau dress dengan potongan unik bisa jadi pilihan.

ESTJ

Sebagai pribadi yang tegas dan bertanggung jawab, ESTJ menyukai outfit yang rapi dan formal. Blazer

berstruktur, kemeja lengan panjang, celana bahan, dan sepatu oxford menjadi andalan. Warna netral dan clean seperti navy, putih, dan abu-abu memperkuat aura kepemimpinan mereka.

ESFJ

ESFJ senang tampil cantik dengan outfit yang harmonis. Mereka menyukai tampilan feminin yang tetap sopan dan stylish. Dress midi, blouse puff-sleeve, dan sepatu flat atau heels mungil sangat pas untuk mereka. Warna seperti rose pink, baby blue, dan putih gading menambah kesan hangat dan approachable.

ENFJ

Sebagai pemimpin alami, ENFJ tampil percaya diri dengan gaya yang elegan dan modis. Dress berpotongan tegas, heels berwarna gelap, dan coat stylish adalah pilihan utama. Warna seperti emerald green, wine, atau navy memperkuat kharisma mereka. (nei,ist/dya)



2026, Indonesia (dari Hal 1) ...

Berdasarkan dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026, pembiayaan utang tersebut bakal diperoleh melalui dua instrumen utama: penerbitan surat berharga negara (SBN) serta penarikan pinjaman. "Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp781.868 miliar," dikutip dari dokumen Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2026, dikutip detikfinance, Selasa (19/8/2025).

Adapun penerbitan SBN akan dibagi menjadi dua kategori, yakni Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Sementara itu, pinjaman akan dilakukan melalui dua cara. Pemerintah akan melakukan pinjaman luar negeri dan dalam negeri.

Dokumen itu mencantumkan jumlah penarikan utang beberapa tahun terakhir. Utang yang direncanakan untuk 2026 akan menjadi yang terbesar sejak pandemi Covid-19. Pada masa pandemi 2021, pemerintah mencatat penarikan utang sebesar Rp870,5 triliun. Angka tersebut kemudian turun menjadi Rp696 triliun pada 2022, Rp404 triliun di 2023, dan Rp558,1 triliun pada 2024. Sementara dalam outlook 2025, utang pemerintah Rp 715,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa penarikan utang akan dilakukan dengan kehati-hatian. Pemerintah juga lebih memprioritaskan penarikan utang dari dalam negeri. "Kita akan menggunakan terutama sumber utang dalam negeri untuk menjaga keamanannya," kata Sri Mulyani.

Ia juga menambahkan, rasio utang Indonesia dalam tiga tahun terakhir relatif stabil di level 39,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pertumbuhan pembayaran bunga utang ini sebenarnya lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Pada 2025, pertumbuhan pembayaran bunga utang sampai 13% terhadap realisasi pembayaran bunga utang 2024.

Adapun pembayaran bunga utang mencakup pembayaran kupon atas SBN, bunga atas pinjaman dan biaya lain yang timbul dalam rangka menjalankan program pengelolaan utang. Besaran pembayaran beban bunga mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal.

"Secara inheren, beban bunga utang terdampak risiko yang bersumber dari volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan perubahan tingkat suku bunga," tulis

dokumen tersebut.

Faktor lain yang turut mempengaruhi beban bunga adalah sentimen pasar atas instrumen surat berharga negara, volume kebutuhan pembiayaan anggaran dan kondisi perekonomian terkini.

Terkait hal ini, pemerintah berkomitmen menjaga pembayaran bunga utang pada level yang efisien dan terkendali melalui kebijakan pengelolaan utang yang prudent, terukur dan berbasis manajemen risiko. Dalam merancang strategi pembiayaan, pertimbangannya adalah keseimbangan antara biaya utang dan tingkat risiko agar tidak membebani fiskal, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

"Untuk menjaga beban bunga tetap terkendali, pemerintah mengutamakan sumber pembiayaan yang efisien dan mengoptimalkan struktur portofolio utang baik dari sisi tenor maupun jenis instrumen, guna menekan volatilitas biaya utang akibat perubahan suku bunga pasar," demikian tertulis dalam dokumen.

Di satu sisi pembangunan prioritas di tengah risiko perekonomian yang meningkat karena kondisi global yang sarat ketidakpastian. Dalam pengelolaan utang ini ada tiga prinsip yang akan digunakan oleh pemerintah. Pertama, akseleratif dengan memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan.

Kedua, efisien dengan memperhatikan penerbitan utang dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dan diversifikasi instrumen utang. Ketiga, seimbang dengan menjaga portofolio utang pemerintah yang optimal pada keseimbangan antara biaya minimal dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal.

Atas rencana penarikan utang ini, sejumlah pengamat menyoroti neraca keuangan negara. Sebelumnya, RAPBN 2026 memproyeksikan defisit sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hasil ini diperoleh dari selisih dengan jumlah belanja negara yang diperkirakan akan mencapai Rp 3.786,5 triliun, atau lebih besar dari pendapatan negara yang ditargetkan mencapai Rp 3.147,7 triliun.

Kemudian, Presiden Prabowo sempat mengutarakan cita-citanya agar Indonesia defisit 0 persen. Hal itu ia sampaikan dalam Pidato Nota Keuangan Rancangan APBN 2026 di Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/8) lalu.

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, m e m p r e d i k s i m u n c u l n y a

konsekuensi buruk bagi perekonomian jika memaksakan defisit 0% tanpa kehati-hatian." Jadi kalau menginginkan tidak ada defisit dalam 2027, itu sesuatu yang jelas bukan mustahil, tapi kalau dipaksakan, khawatir ada konsekuensi buruknya bagi perekonomian," kata Faisal.

Melihat rencana penarikan utang dengan jumlah tertinggi sepanjang 5 tahun terakhir, mungkin cita-cita defisit anggaran sebesar 0 persen dapat tercapai? Ikuti ulasannya dalam Editorial Review.

Beralih ke Sumatra, detikSore akan menuju Riau untuk melihat lebih dekat Festival Pacu Jalur 2025. Dilaksanakan di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), puncak acara diresmikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Acara ini menjadi perhatian publik, tidak hanya dalam negeri tetapi juga luar negeri. Hal ini disebabkan oleh ramainya tren tarian aura farming yang dipopulerkan oleh salah satu peserta Pacu Jalur. Lalu apa tujuan diadakannya acara ini? Sebesar apa animo masyarakat terkait acara ini? Ikuti laporan Jurnalis detikSumut selengkapnya.

"Pemerintah memastikan pengelolaan utang berjalan secara prudent, akuntabel, dan terkendali, sehingga dapat dijaga keberlanjutan fiskal," demikian tertulis dalam Buku II Nota Keuangan, dikutip tempo Selasa (19/8/2025).

Berdasarkan dokumen tersebut, rasio utang terhadap PDB melonjak sejak 2023. Pada 2021, di masa pandemi Covid-19, rasio utang tercatat sebesar 40,7 persen. Kemudian angkanya menurun menjadi 39,7 persen pada 2022 dan turun lagi menjadi 39,2 persen pada 2023. Namun pada 2024, rasio utang naik menjadi 39,8 persen. Sementara itu, realisasi rasio utang sampai dengan Juni 2025 tercatat 39,9 persen.

Adapun pembayaran bunga utang dalam RAPBN 2026 mencapai Rp 599,4 triliun. Angka ini naik 8,6 persen dari outlook 2025 sebesar Rp 552,1 triliun. Jumlah bunga utang tersebut terdiri atas pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 538,7 triliun dan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 60,7 triliun.

Menurut peneliti dari Centre for Strategic and International Studies, Deni Friawan, mengatakan besarnya porsi pembayaran bunga utang dalam pembiayaan utang menunjukkan pemerintah saat ini sedang "gali lubang tutup lubang" alias mencari pinjaman untuk membayar utang. Dia pun menyoroti jumlah total utang dan rasio utang yang meningkat selama beberapa tahun terakhir.

"Walaupun porsi pembayaran bunga utang telah sedikit berkurang, porsinya itu dalam belanja negara

masih sangat besar, yaitu sekitar 19 persen," tutur Deni dalam media briefing di kantor CSIS, Jakarta Pusat, Senin (18/8/2025).

Dia menyebut spread atau selisih antara utang yang diterbitkan dan pembayaran bunga utang semakin mengecil. Sehingga, wajar bila rasio utang terhadap PDB terus meningkat. Menurut Deni, kondisi ini akan membuat ruang fiskal semakin menyempit.

Di sisi lain, Deni menyoroti belanja pemerintah yang diutamakan untuk program prioritas Presiden Prabowo. Sedangkan, pemerintah mesti menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen. "Makanya harus ada trade off, harus ada yang dikorbankan. Dan itu kami tadi jelaskan bahwa trade off-nya adalah fiskal ke daerah itu menjadi lebih rendah," ucap Deni.

Sebagai informasi, pemerintah sendiri telah menetapkan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada 2026 sebesar Rp 650 triliun. Angka tersebut menurun dari anggaran tahun ini yang mencapai Rp 919 triliun.

Sementara itu, di luar rencana penambahan utang tersebut di atas, utang Indonesia tembus Rp1.433 T di 2026. Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Riza A Pujarman mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai meningkatnya beban utang pada 2026.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang diolah Indef, total utang yang harus dibayar pemerintah pada 2026, baik pokok jatuh tempo maupun bunga, mencapai Rp1.433,40 triliun. Angka itu lebih tinggi dibandingkan 2025 yang hanya Rp1.352,48 triliun.

Rinciannya, utang pokok jatuh tempo pada 2026 sebesar Rp833,96 triliun, melonjak dari Rp800,33 triliun pada tahun sebelumnya. Sementara itu, beban bunga utang juga naik dari Rp552,15 triliun pada 2025 menjadi Rp599,44 triliun pada tahun depan.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pembayaran bunga utang diproyeksikan setara dengan 22,27% penerimaan perpajakan, 19,11% pendapatan dalam negeri, 19,05% belanja pemerintah pusat, serta 15,83% belanja negara.

"Kalau kita bandingkan beban utang ini terhadap belanja belanja negara, pendapatan dalam negeri, maupun penerimaan perpajakan, porsinya sangat tinggi. Ini perlu menjadi perhatian dan pertimbangan serius pemerintah," ujar Riza dalam diskusi publik Indef bertajuk Tanggapan Atas Nota Keuangan RAPBN 2026, Sabtu (16/8/2025). (han,ist,ant/lut)

DUGAAN KORUPSI BANSOS KEMENSOS

KPK TETAPKAN LIMA TERSANGKA, SIAPA BERIKUTNYA?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka dan mencegah empat orang, pada kasus dugaan korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos).

Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka. Dimana penghitungan awal oleh penyidik terkait dugaan kerugian keuangan negaranya mencapai kurang lebih Rp 200 miliar," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta merilis Antara, Selasa (19/8/2025).

Walaupun demikian, Budi belum dapat memberitahukan lebih lanjut mengenai identitas tersangka kasus tersebut.

Selain itu, hari ini KPK juga mencegah empat orang untuk ke luar negeri, terkait kasus yang sama yaitu dugaan korupsi pengangkutan penyaluran bansos di Kemensos. "KPK melakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap empat orang berinisial ES, BRT, KJT, dan HER," ungkap Budi.

Diketahui BRT sebagai Bambang Rudijanto, Komisararis Utama PT Dosni Roha; HT adalah Herry Tho, Direktur Operasional DNR Logistics tahun 2021 -2024; KJT, Kanisius Jerry Tengker Dirut DNR Logistics tahun 2018-2022; dan ES, Edi Suharto, Staf Ahli, Menteri Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Kemensos.

Lebih lanjut Budi mengatakan pencegahan tersebut, berlaku untuk enam bulan ke depan sejak tanggal 12 Agustus 2025. "Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh KPK karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud," jelasnya.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan kasus tersebut pada 13 Agustus 2025, dan telah menetapkan tersangka. Namun, belum dapat memberitahukan mengenai jumlah maupun identitas tersangka kasus tersebut. Apakah masih ada tersangka lainnya?

Di sisi lain, KPK mengatakan kasus dugaan korupsi terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial merupakan pengembangan perkara dugaan korupsi di Kemensos sebelumnya.

KPK mengusut kasus terkait bansos di Kemensos dimulai dari perkara dugaan suap dalam



Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek pada lingkungan Kemensos tahun 2020, yakni pada 6 Desember 2020. Salah satu tersangka kasus itu adalah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Pada 15 Maret 2023, KPK mengumumkan penyidikan dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos tahun 2020-2021.

Kemudian 26 Juni 2024, KPK mengumumkan memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos tahun 2020.

Di kasus ini, KPK telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Ia adalah Direktur Utama Mitra Energi Persada (MEP), Ivo Wongkaren, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyaluran bansos Kemensos.

Sementara itu, sebelum dicegah KPK ke luar negeri, Bambang Tanoesoedibjo juga telah beberapa kali diperiksa terkait kasus korupsi bantuan sosial. Dalam catatan pemberitaan detikcom, Bambang

pernah diperiksa pada 14 Desember 2023.

Saat itu, Bambang diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi bansos beras pada Kementerian Sosial. Bambang hadir dalam pemeriksaan tersebut, namun memilih bungkam usai diperiksa tim penyidik KPK.

Di pertengahan bulan ini, Bambang kembali dipanggil KPK. Dia dipanggil terkait kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial tahun 2020. Pemanggilan Bambang terjadi pada 14 Agustus, atau sehari setelah KPK mengumumkan telah membuka penyidikan kasus tersebut.

Dalam pemeriksaan di kasus ini, KPK memanggil Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (BRT) selaku Komisararis Utama PT Dosni Roha Logistik. "KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengangkutan penyaluran bantuan sosial di Kementerian Sosial," kata juru KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).

"BRT, Komisararis Utama PT Dosni Roha Logistik," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menanggapi penetapan tersangka

dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gus Ipul mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK tersebut merupakan pembelajaran penting bagi kementerian yang kini sedang ia pimpin. "Ya, itu menjadi bagian dari pelajaran penting untuk Kementerian Sosial ya," kata Gus Ipul, Selasa (19/8/2025).

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul mengajak seluruh jajarannya di Kemensos untuk menjadikan proses hukum ini sebagai pembelajaran agar hal-hal serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. "Jadi, kita ingin mengajak seluruh jajaran Kementerian Sosial bisa belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pengalaman yang tidak baik jangan sampai terulang," tuturnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menghalang-halangi atau melakukan intervensi terhadap proses hukum yang tengah ditangani oleh KPK tersebut. Anti-bribery compliance training

"Kami sudah berkomitmen tidak akan mengintervensi (kasus), tidak akan mengajak, tidak akan memberikan peluang kepada siapapun untuk terjadi penyelewengan di lingkungan Kementerian Sosial," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos). "Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 orang dan 2 korporasi sebagai tersangka," kata Budi, Selasa (19/8/2025).

Meski demikian, KPK masih belum mengungkap identitas dari para tersangka dan korporasi yang diduga terlibat dalam kasus ini. Adapun, Budi mengatakan bahwa kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos ini ditaksir mencapai Rp 200 miliar. Anti-corruption training

"Di mana penghitungan awal oleh penyidik terkait dugaan kerugian keuangan negaranya mencapai kurang lebih Rp 200 miliar," tuturnya. (han,ant,ist/lut)



Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang dan dua korporasi sebagai tersangka. Dimana penghitungan awal oleh penyidik terkait dugaan kerugian keuangan negaranya mencapai kurang lebih Rp 200 miliar,"

BUDI PRASETYO
Juru Bicara KPK